

Rekonstruksi Berkah dan Politik Uang: Analisis Kritis terhadap Praktik Sedekah di Kalangan Kelas Bawah

Rizal¹, Arja Amin Munashoha²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia¹⁻²

Email: rizal24131319@uin-palangkaraya.ac.id¹, arjaamin268@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article history

Received: 05-05-2026

Revised: 11-05-2026

Accepted: 20-05-2026

DOI: <https://doi.org/10.61930/jsii.v4i1>

Kata Kunci

Politik Uang
Kesadaran Magis
Paulo Freire
Berkah
Sedekah

ABSTRAK

Praktik politik uang (*money politics*) di Indonesia terus menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi, dengan data menunjukkan bahwa mayoritas kehadiran masyarakat di TPS dipengaruhi oleh imbalan materi daripada kesadaran politik. Fenomena ini menjadi sangat krusial diteliti karena adanya upaya kandidat politik membungkus transaksi suap menggunakan istilah keagamaan seperti "berkah" dan "sedekah" untuk memanipulasi masyarakat kelas bawah yang terhimpit secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana rekonstruksi makna istilah religi tersebut digunakan sebagai alat normalisasi praktik politik uang guna melanggengkan kesadaran magis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dari berbagai sumber literatur dan data statistik, yang kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan pisau analisis sosiologi kritis Paulo Freire. Temuan tulisan ini secara konkret menunjukkan bahwa konstruksi makna "berkah" dan "sedekah" telah mereduksi nilai sakral agama menjadi instrumen transaksional yang menjinakkan daya kritis masyarakat. Kondisi ekonomi yang tertekan memaksa kaum tertindas terjebak dalam kesadaran magis dan beban psikologis hutang budi (*cultural scaffolding*), sehingga menghambat tercapainya *conscientização*. Akibatnya, politik uang tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran etika, melainkan bantuan sosial yang wajar diterima. Pembebasan politik sejati memerlukan pendidikan yang membebaskan dan rekonstruksi pemahaman keagamaan yang autentik untuk mengembalikan kedaulatan rakyat..

ABSTRACT

Keywords

Money Politics
Magical Consciousness
Paulo Freire
Berkah
Sedekah..

Money politics in Indonesia continues to pose a significant threat to the quality of democracy, with data indicating that the majority of voter turnout is influenced by material incentives rather than political awareness. This phenomenon is crucial to investigate due to the efforts of political candidates to cloak bribery transactions in religious terms such as "berkah" (blessings) and "sedekah" (alms) to manipulate lower-class communities facing economic hardship. This study aims to critically analyze how the reconstruction of these religious terms serves as a normalization tool for money politics, thereby perpetuating "magical consciousness". Data were collected through library research from various literary sources and statistical data, then processed using descriptive-analytical techniques through the lens of Paulo Freire's

critical sociology. The findings concretely demonstrate that the reconstruction of "berkah" and "sedekah" has reduced sacred religious values into transactional instruments that stifle public critical thinking. Distressed economic conditions force the oppressed into a state of magical consciousness and the psychological burden of indebtedness (cultural scaffolding), hindering the achievement of conscientização. Consequently, money politics is no longer perceived as an ethical violation, but rather as acceptable social assistance. True political liberation requires liberating education and an authentic reconstruction of religious understanding to restore political sovereignty to the people as conscious and critical subjects of history

PENDAHULUAN

Setiap pesta demokrasi di Indonesia, praktik politik uang (*money politics*) masih menjadi tantangan besar bagi kualitas demokrasi, terutama di tingkat desa atau Pilkades. Praktik ini sering kali dianggap sebagai "fakta sosial" yang membudaya dan dilakukan secara terang-terangan (Tulus, 2025). Data dari Kemendagri bahkan menunjukkan angka yang cukup mengejutkan, di mana sekitar 70 hingga 80% masyarakat datang ke TPS bukan karena kesadaran politik, melainkan karena pengaruh politik uang. Kondisi ini berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan pendidikan. Berdasarkan data Bank Dunia, dengan sekitar 194 juta penduduk yang masih tergolong miskin dan mayoritas hanya lulusan tingkat dasar atau menengah, imbalan uang menjelang pemilihan menjadi godaan yang sulit ditolak. Rendahnya tingkat pendidikan ini sejalan dengan evaluasi KPU yang menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih di Indonesia masih berada pada tahap *engagement*, yakni hadir ke TPS namun belum memiliki kesadaran politik yang mendalam. Akibatnya, terjadi hubungan "simbiosis mutualisme" di mana masyarakat kelas bawah yang terdesak kebutuhan ekonomi bersedia menjual hak suaranya demi imbalan materi jangka pendek, meskipun hal tersebut harus mengorbankan kualitas kepemimpinan dan moralitas bangsa dalam jangka panjang (KPU Papua Pegunungan, 2025).

Kondisi ekonomi sosial masyarakat kelas bawah inilah yang menjadi bahan bakar utama mengapa praktik politik uang begitu sulit diberantas. Bagi masyarakat yang hidup dalam himpitan kemiskinan, uang politik tidak lagi dipandang melalui kacamata hukum atau pelanggaran demokrasi, melainkan dilihat sebagai bantuan

materi yang sangat mendesak. Dalam posisi tertindas secara ekonomi, pertimbangan logis mengenai kualitas pemimpin jangka panjang sering kali kalah oleh kebutuhan perut jangka pendek. Hal ini menciptakan kerentanan politik yang akut; di mana kemiskinan struktural memaksa mereka untuk bersikap pragmatis (Ahmad, Erawati, & Dakhoir, 2023). Akibatnya, hubungan antara pemberi dan penerima uang bukan lagi sekadar transaksi gelap, melainkan dianggap sebagai solusi instan atas kesulitan hidup, yang pada akhirnya menormalisasi praktik tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan perlu demi kelangsungan hidup sehari-hari.

Menurut Pusat Edukasi Antikorupsi (2024), fenomena politik uang ini sering kali muncul dalam bentuk yang lebih halus melalui pemanfaatan simbol kultur dan agama, atau yang populer dikenal sebagai "serangan fajar". Para kandidat politik kerap membungkus pemberian uang atau barang dengan istilah sedekah. Padahal, secara sosiologis, ini adalah upaya konstruksi makna agar praktik beli suara (*vote buying*) terlihat sah dan suci di mata masyarakat. Habib Ja'far Shodiq Al-Hadar menegaskan bahwa memanfaatkan agama untuk kepentingan politik pribadi seperti ini merupakan bentuk penipuan terhadap rakyat sekaligus terhadap Tuhan. Dalam perspektif agama, sedekah seharusnya murni didasari ketulusan, namun dalam politik uang, sedekah berubah menjadi transaksi ekonomi yang manipulatif. Konstruksi kata "sedekah" atau "berkah" inilah yang kemudian digunakan untuk menjinakkan daya kritis pemilih. Alih-alih menjadi ajang adu gagasan dan integritas, pemilu justru tereduksi menjadi sekadar transaksi materi yang dibungkus dengan identitas keagamaan, di mana nilai-nilai luhur agama dikorbankan demi meraih kekuasaan sesaat.

Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, penerimaan "sedekah politik" ini mencerminkan apa yang disebut Paulo Freire sebagai "Kesadaran Magis" atau "*semi-intransitif*" (Butar, 2008). Pada tahap ini, masyarakat hanya berfokus pada kebutuhan alamiah untuk bertahan hidup (*survival*) sehingga mereka terisolasi dari pengetahuan politik yang lebih luas (Bethari, 2024). Eksistensi kemiskinan tidak dilihat sebagai masalah sistemik, melainkan dipahami sebagai "takdir" atau "kehendak Tuhan". Kondisi mental inilah yang dimanfaatkan melalui

politik uang; ketika masyarakat menerima bantuan materi, muncul tekanan psikologis berupa perasaan berhutang budi yang mendalam. Penerima merasa terbebani secara moral untuk membalas kebaikan tersebut dengan suara mereka, yang pada akhirnya membatasi kebebasan bertindak dan mengabaikan tanggung jawab kewargaan (Akbar, Hakim, Saefa, & Harahap, t.t., hlm 36). Akibatnya, alih-alih mencapai kesadaran *transitif-naif* apalagi *transitif-kritis*, masyarakat justru terjebak dalam hubungan kekuasaan yang menghambat transparansi. Mereka menyerahkan hak kedaulatannya demi melunasi hutang budi sesaat, yang oleh Freire dianggap sebagai kegagalan dalam melihat realitas secara kritis.

Berdasarkan realitas tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana rekonstruksi makna "berkah" digunakan sebagai alat untuk menormalisasi praktik politik uang di tengah masyarakat yang terdesak secara ekonomi. Penulis ingin membongkar bagaimana manipulasi istilah keagamaan bekerja dalam melanggengkan "kesadaran magis", sehingga praktik suap tidak lagi dilihat sebagai pelanggaran etika politik, melainkan sebagai bantuan materi yang wajar diterima. Lebih lanjut, tulisan ini akan membedah bagaimana perasaan hutang budi dan tekanan psikologis menjadi belenggu yang menghambat proses pembebasan politik kaum tertindas. Melalui pendekatan sosiologi kritis Paulo Freire, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan pentingnya merekonstruksi simbol-simbol agama agar tidak terus disalahgunakan sebagai alat kontrol sosial yang merugikan kedaulatan rakyat dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), di mana penulis berupaya membedah fenomena politik uang di tingkat desa melalui pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber literatur. Proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti data statistik tingkat kemiskinan dari Bank Dunia, laporan indeks partisipasi pemilih dari KPU, serta temuan riset dari Kemendagri mengenai fenomena politik uang. Untuk memperkuat argumen dan memastikan analisis sejalan dengan perkembangan isu terkini, penulis juga menelaah berbagai artikel

ilmiah serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan politik uang dan sosiologi masyarakat marginal.

Selain sumber tertulis, penelitian ini menggunakan studi dokumentasi berupa sumber digital, seperti video wawancara dan pernyataan tokoh agama (di antaranya Habib Ja'far), guna memperoleh perspektif mendalam mengenai manipulasi istilah keagamaan dalam ranah politik. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pisau analisis sosiologi kritis dari Paulo Freire, khususnya melalui teori tiga tahap kesadaran yang meliputi kesadaran magis, naif, dan kritis. Terakhir, teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan kenyataan objektif di lapangan yang kemudian dikritisi untuk menghasilkan kesimpulan mendalam mengenai konstruksi makna "berkah" dalam praktik politik uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Makna "Berkah" dan "Sedekah" sebagai Instrumen Normalisasi Politik Uang

Untuk memahami bagaimana kedua istilah ini dimanipulasi dalam praktik politik uang, perlu terlebih dahulu dipahami makna autentiknya. Kata "berkah" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-barakah* atau *al-barkah*, yang berakar dari kata kerja *baraka*. Menurut para pakar bahasa Arab, kata *al-barakah* secara leksikal berarti "berkembang, bertambah, dan kebahagiaan". Adapun secara istilah (syariat), berkah didefinisikan sebagai kebaikan berlimpah yang diberikan Allah kepada siapa yang dikehendaki-Nya, baik berupa materi maupun non materi. Dalam Al-Qur'an, kata *baraka* beserta seluruh turunannya disebutkan sebanyak 32 kali yang tersebar di berbagai surah dengan tema yang beragam. Perinciannya adalah: *baraka* (بارك) disebutkan 7 kali pada QS. Fusilat: 10, Al-Isra': 1, Al-Anbiya': 71, 81, Saba': 18, As-Saffat: 113, dan Al-A'raf: 137; *burika* (بورك) disebutkan 1 kali pada QS. An-Naml: 8; *tabaraka* (تبارك) disebutkan 9 kali pada QS. Al-A'raf: 54, Al-Mukminun: 24, Al-Furqan: 1, 10, 61, Ghafir: 64, Az-Zukhruf: 85, Ar-Rahman: 78, dan Al-Mulk: 1; *barakat* (بركات) disebutkan 3 kali pada QS. Al-A'raf: 96, Hud: 48, 73; *mubâarak* (مبارك) disebutkan 5 kali pada QS. Al-An'am: 92, 155, Sad: 29, Al-Mukminun: 29, Al-Qasas: 30; *mubaraka* (مباركا) disebutkan 3 kali pada QS. Ali Imran:

96, Maryam: 31, Qaf: 9; serta *mubarakah* (مباركة) disebutkan 3 kali pada QS. An-Nur: 35, 61, dan Ad-Dukhan: 3 (Hasanah, 2018). Keseluruhan penyebutan ini secara konsisten menunjukkan bahwa berkah adalah anugerah ilahi yang bersumber mutlak dari Allah SWT meliputi tempat, manusia pilihan, waktu, dan sumber daya alam dan tidak dapat diklaim, diperjualbelikan, ataupun “diberikan” oleh siapa pun selain-Nya.

Senada dengan itu, kata “sedekah” juga memiliki akar makna yang jauh lebih mulia dari sekadar pemberian materi. Kata ini berasal dari bahasa Arab *shadaqah*, yang bersumber dari akar kata *ṣidq* atau *ṣiddiq* yang berarti “kejujuran” atau “kebenaran.” Akar kata ini mengisyaratkan bahwa esensi terdalam sedekah adalah ketulusan hati, orang yang bersedekah pada hakikatnya sedang berlaku jujur kepada dirinya sendiri atas karunia yang telah Allah berikan (Yunita, 2022). Secara *syara'*, sedekah didefinisikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya, semata-mata karena mengharap rida Allah dan pahala dari-Nya (Paslah & Amiruddin, 2021). Dalam Al-Qur'an, akar kata *ṣadaqa* beserta seluruh turunannya disebutkan sebanyak 155 kali dalam berbagai bentuk yang berbeda. Di antara bentuk-bentuk turunan kata tersebut, *Ṣādiqīna* (صَادِقِينَ) disebutkan 50 kali; *Muṣaddiqān* (مُصَدِّقًا) disebutkan 13 kali; *Ṣidqin* (الصِّدْق) disebutkan 10 kali; *Aṣ-Ṣadaqāti* (الصَّدَقَاتِ) disebutkan 7 kali; *Ṣādiqūna* (صَادِقُونَ) disebutkan 6 kali; serta *Ṣadaqū*, *Ṣaddaqa*, *Ṣadaqatan*, dan *Muṣaddiqun* masing-masing disebutkan 5 kali, serta berbagai bentuk turunan lainnya masing-masing disebutkan 1 hingga 4 kali. Adapun kata *ṣadaqah* secara eksplisit termuat dalam 15 ayat Al-Qur'an, yaitu: QS. Yusuf: 88, QS. Al-Baqarah: 196, 263, 264, 271, 276, QS. An-Nisa': 4, 114, QS. At-Taubah: 58, 60, 79, 103, 104, serta QS. Al-Mujadalah: 12 dan 13, dengan 14 di antaranya merupakan ayat Madaniyah dan 1 ayat Makiyah (Wakhidah, 2025). Secara tematik, ayat-ayat tersebut membahas sedekah dalam konteks penyucian jiwa pemberinya (QS. At-Taubah: 103), keutamaan bersedekah secara tersembunyi kepada orang fakir (QS. Al-Baqarah: 271), larangan menggugurkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebutnya (QS. Al-Baqarah: 264), serta janji Allah melipatgandakan nilai sedekah (QS. Al-Baqarah: 276). Cakupan maknanya pun jauh melampaui harta benda, karena sedekah dalam Islam mencakup seluruh perbuatan

baik yang dilakukan secara ikhlas dan sukarela, mulai dari ucapan yang baik hingga tindakan menolong sesama (Paslah & Amiruddin, 2021).

Fondasi makna yang demikian sakral, persoalan serius muncul ketika kedua konsep ini dihadapkan pada realitas masyarakat yang terdesak secara ekonomi. Kemiskinan dan ketimpangan struktural menciptakan kondisi di mana kebutuhan dasar sehari-hari tidak terpenuhi, sehingga pemberian uang menjelang pemilihan, betapa pun kecil nominalnya, terasa seperti pertolongan nyata yang sulit ditolak (Edma, Darmawan, Rumanasen, Alfitrah, & Sinaga, 2025). Kondisi tertekan inilah terjadi penyalahertian yang keliru, "berkah" tidak lagi dipahami sebagai anugerah ilahi yang mensyaratkan keimanan dan ketaatan kepada Allah, melainkan direduksi menjadi rezeki yang seolah-olah jatuh dari tangan kandidat, demikian pula "sedekah" tidak lagi dipahami sebagai ibadah yang lahir dari keikhlasan tanpa pamrih, melainkan sebagai pemberian yang wajar diterima dari orang yang "dermawan." Kondisi kemiskinan yang berkelanjutan tanpa akses terhadap pendidikan yang membebaskan menjadikan masyarakat rentan menerima narasi yang membungkus kepentingan transaksional dengan selubung kesucian religius. Bagi mereka yang hidup dalam kekurangan, perbedaan antara "sedekah yang tulus" dan "sedekah politis" nyaris tidak terasa relevan ketika kebutuhan hidup jauh lebih mendesak dari sekadar pertanyaan tentang niat pemberi. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan secara sistematis oleh aktor politik untuk mengonstruksi ulang makna berkah dan sedekah sebagai instrumen normalisasi praktik politik uang sebuah proses yang perlu dibaca lebih dalam melalui kerangka analisis kritis.

2. Kondisi Ekonomi dan Kelanggengan "Kesadaran Magis" dalam Memandang Politik Uang sebagai Sedekah

Kondisi ekonomi masyarakat di kalangan kelas bawah ini, ialah kondisi yang dimana secara aktif membentuk cara pandang pola pikir, dan skala prioritas seseorang dalam menghadapi realitas sosialnya (Kristiani, Hadiwijoyo, & Sihainenia, 2025). Ketika kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan tidak terpenuhi secara konsisten, maka cakrawala berpikir seseorang akan menyempit ke titik yang paling mendesak: bagaimana bertahan hidup hari ini.

Dalam konteks inilah, uang yang diberikan oleh kandidat menjelang pemilihan, betapapun kecil nominalnya, memiliki daya tarik yang sulit dilawan oleh nalar kritis mana pun. Ramadhan, Rahmawati, Sari, & Ananto (2024) menegaskan bahwa kemiskinan adalah salah satu tantangan struktural terbesar dalam pencegahan politik uang di Indonesia, karena kondisi ekonomi yang tertekan menjadikan masyarakat sulit menolak imbalan materi sesaat meskipun mereka menyadari dampak buruknya bagi kualitas demokrasi jangka panjang.

Pemikiran Paulo Freire mengenai tipologi kesadaran manusia menjadi relevan untuk membedah bagaimana masyarakat merespons realitas sosialnya. Freire mengklasifikasikan kesadaran manusia ke dalam tiga tingkatan utama. Pertama adalah kesadaran magis (*magical consciousness*), di mana individu atau kelompok gagal memahami keterhubungan antar-faktor dalam kehidupan, seperti ketidakmampuan masyarakat miskin dalam melihat kaitan antara kondisi ekonomi mereka dengan kebijakan sistemik. Pada tahap ini, orang-orang merasa ketidakberdayaan mereka disebabkan oleh hal-hal di luar kendali mereka, baik yang bersifat alami maupun supranatural. Kedua, kesadaran naif (*naive consciousness*), yang mulai menyadari adanya masalah namun masih memandang faktor manusia secara individual sebagai akar permasalahannya tanpa melihat konteks yang lebih luas. Terakhir, kesadaran kritis (*critical consciousness*), sebuah tingkatan tertinggi di mana masyarakat mampu mengidentifikasi bahwa sumber permasalahan yang mereka hadapi berakar pada ketimpangan sistem dan struktur sosial (Butar, 2008).

Paulo Freire menamai kondisi kesadaran yang lahir dari tekanan struktural semacam ini sebagai *consciência mágica* atau kesadaran magis. Bethari (2024) menjelaskan bahwa pada tahap kesadaran semi-intransitif ini, manusia hanya berfokus pada kebutuhan alamiah untuk bertahan hidup sehingga terisolasi dari pengetahuan akan politik maupun sejarah. Eksistensi dirinya tidak dilihat sebagai sebuah masalah kritis, melainkan dipahami sebagai "takdir" atau "kehendak Tuhan". Kesadaran semi-intransitif sarat akan magis dan bernuansa keputusasaan karena tidak melihat bahwa eksistensi diri dan tindakannya dapat membuat perubahan. Dalam kondisi inilah masyarakat tidak hanya menjadi rentan, tetapi secara aktif terbuka terhadap narasi yang melegitimasi pemberian material dari

aktor politik sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan bersifat ilahi. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi politik masyarakat kelas bawah, yang menurut Eka & Syamsul Rijal (2026) merupakan salah satu tantangan demokrasi terbesar di Indonesia, di mana banyak warga negara terlibat dalam proses politik hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek yang aktif dan kritis. Mereka memilih berdasarkan tekanan, informasi yang bias, atau sekadar kebiasaan, tanpa pemahaman mendalam tentang konsekuensi dari pilihan mereka.

Kesadaran magis ini bukan semata persoalan kebodohan individual, melainkan respons adaptif yang lahir dari kondisi nyata di mana pendidikan yang membebaskan tidak pernah hadir. Freire menjelaskan bahwa sistem pendidikan yang ada justru kerap bekerja layaknya "pendidikan gaya bank" (*banking concept of education*), di mana pengetahuan dianggap sebagai deposito yang dihibahkan oleh pihak yang merasa berpengetahuan kepada pihak yang dianggap tidak tahu apa-apa, tanpa memberi ruang bagi peserta didik untuk bertanya, menolak, atau mengkritisi (Eka dkk., 2026). Konsep inilah yang jika diadaptasi ke dalam konteks politik, menjelaskan secara tepat dinamika yang terjadi antara kandidat dan pemilih: kandidat berposisi sebagai pihak yang "memberi" sekaligus "menentukan", sementara masyarakat hanya berperan sebagai penerima pasif yang tidak mempertanyakan, apalagi menolak. Uang yang diberikan diterima begitu saja, tanpa ada kesadaran bahwa ia sesungguhnya adalah instrumen suap yang merusak kedaulatan mereka sendiri. Dalam logika ini, relasi kuasa dalam politik uang mereplikasi secara sempurna logika pendidikan gaya bank; ada pihak yang mendominasi dan ada pihak yang menerima tanpa daya kritis.

Temuan empiris dari penelitian Aspinall & Rohman (2017) di dua daerah pemilihan di Jawa memperkuat pembacaan ini secara signifikan. Mereka menemukan bahwa praktik *serangan fajar* tidak dipersepsi oleh penerima sebagai transaksi pembelian suara, melainkan justru dipahami dalam kerangka *moral economy* pemberian hadiah (*gift-giving*), di mana uang yang beredar di masa kampanye dilihat sebagai sinyal kemurahan hati dan kedekatan kandidat dengan rakyat. Para kandidat dan broker bahkan secara sadar menghindari bahasa transaksional di hadapan pemilih, dan sebagai gantinya menekankan ikatan

emosional dan hubungan personal. Ini adalah strategi yang sangat terkalkulasi, dengan membingkai pemberian uang bukan sebagai "beli suara" melainkan sebagai ekspresi kepedulian, para kandidat secara sistematis memanfaatkan ketidakmampuan pemilih untuk membaca dunia secara kritis, tepat seperti yang diperingatkan Freire tentang bahaya *banking concept* yang menumpulkan daya kritis penerimanya.

Kerangka inilah, pemanfaatan simbol "berkah" dan "sedekah" menjadi sangat strategis. Bagi masyarakat yang terjebak dalam kesadaran magis, narasi bahwa pemberian uang itu adalah "sedekah" dari kandidat yang dermawan bukan hanya mudah diterima, tetapi bahkan terasa masuk akal secara religius. Padahal, sedekah dalam Islam secara substansial didefinisikan sebagai pemberian yang lahir dari ketulusan hati semata-mata karena mengharap rida Allah, bukan sebagai instrumen untuk membeli loyalitas politik (Paslah & Amiruddin, 2021). Mereka tidak memiliki alat konseptual untuk mempertanyakan niat di balik pemberian tersebut. Bethari (2024) menegaskan bahwa selama masyarakat tertindas tidak mencapai *conscientizacao* atau kesadaran kritis yang memungkinkan mereka membaca realitas secara mendalam, mereka akan terus terjebak dalam kondisi kesadaran magis yang menjadikan mereka objek sejarah, bukan subjek yang menentukan arahnya. Kondisi ini terkonfirmasi oleh data empiris yang mengkhawatirkan. Survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan langsung pada hari pencoblosan Pemilu 2024 mencatat bahwa sebanyak 35 persen responden menentukan pilihannya karena uang, meningkat dari 28 persen pada Pemilu 2019. Yang lebih memprihatinkan, jumlah masyarakat yang menganggap politik uang tidak wajar pun menurun tajam, dari 67 persen pada 2019 menjadi hanya 49,6 persen pada 2024, sementara pemilih yang menolak politik uang turun dari 9,8 persen menjadi hanya 8 persen (Muhtadi, 2024). Tren ini bukan sekadar angka statistik; ia adalah cerminan dari proses pendalaman kesadaran magis yang berlangsung dari satu siklus pemilihan ke siklus berikutnya. Alih-alih melahirkan kesadaran transitif yang kritis, pengulangan praktik politik uang justru semakin menormalisasinya, karena masyarakat berulang kali mengalami konfirmasi bahwa "begitulah cara kerja dunia

Rizal, Arja Amin Munashoha

Rekonstruksi Berkah dan Politik Uang: Analisis Kritis terhadap Praktik Sedekah di Kalangan Kelas Bawah

ini" dan bahwa tidak ada konsekuensi nyata bagi mereka yang menerima maupun memberi.

3. Implikasi Perasaan Hutang Budi dan Tekanan Psikologis terhadap Terhambatnya Proses Pembebasan Politik Kaum Tertindas

Dampak paling merusak dari politik uang yang dibingkai sebagai “sedekah” tidak terletak pada momen transaksionalnya, melainkan pada beban psikologis berupa perasaan hutang budi yang secara diam-diam menggerogoti kebebasan politik penerimanya. Tekanan psikologis ini menjadi penghalang utama bagi tercapainya *conscientizacao*, yang menurut Freire merupakan syarat mutlak bagi proses pembebasan sejati kaum tertindas (Bethari, 2024). Hal ini terjadi karena pemberian tersebut menciptakan ikatan moral yang melumpuhkan nalar kritis masyarakat terhadap pemberi imbalan.

Freire menegaskan bahwa dalam sistem yang tidak adil, kekuasaan digunakan untuk memaksa kaum tertindas melalui penyebaran mitos sosial dan distorsi konsep kehidupan guna merasionalisasi penindasan tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tidak berdaya cenderung menerima kondisi mereka sebagai sebuah keniscayaan (fatalistik) dan hanya menggantungkan harapan pada keberuntungan atau faktor supranatural. Dalam konteks inilah *conscientizaçao* menjadi syarat mutlak, karena ia bukan sekadar teknik transfer informasi, melainkan sebuah proses dialogis yang memungkinkan individu memecahkan masalah eksistensial secara bersama-sama. Melalui proses penyadaran ini, setiap orang didorong untuk melihat sistem sosial secara kritis, memahami kontradiksi dalam hidup mereka, dan melakukan transformasi nyata terhadap realitas yang menindas guna mencapai 'kemanusiaan yang lebih utuh'. Sebagai tujuan puncak pendidikan kaum tertindas, *conscientizaçao* menuntut partisipasi aktif sebagai intinya, di mana pembebasan bukan hanya berarti reformasi individu, tetapi juga penciptaan norma, aturan, dan kebijakan baru yang lebih adil.

Dalam konteks budaya Indonesia yang kuat menjunjung nilai resiprositas, pemberian material dari seorang kandidat tidak pernah dipersepsi sebagai transaksi netral. Ia selalu datang beserta muatan moral yang mengikat; bahwa kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Aspinall dkk. (2017) mencatat bahwa norma *resiprositas* sosial inilah yang menjadi "perancah kultural" (*cultural scaffolding*) bagi efektivitas politik uang, para kandidat dan broker

mendistribusikan uang tanpa secara eksplisit meminta timbal balik, karena mereka mengandalkan tekanan moral internal penerima untuk membalas kebaikan tersebut dengan suara mereka di hari pemilihan. Bahkan ditemukan bahwa banyak pemilih yang menerima pemberian dari lebih dari satu kandidat pun tetap terikat oleh tekanan psikologis ini, karena setiap pemberian menciptakan lapisan kewajiban moral tersendiri. Tekanan semacam ini bekerja jauh lebih halus dan lebih efektif dibandingkan ancaman eksplisit sekalipun, karena ia beroperasi dari dalam diri penerima sendiri, bukan dari luar. Bethari (2024) menjelaskan bahwa kondisi inilah yang oleh Freire disebut sebagai *fear of freedom*, di mana kaum tertindas justru memilih bertahan dalam kondisi penindasan yang familier ketimbang mengambil risiko mempertanyakan dan menolak relasi kuasa yang selama ini menjadi sandaran hidupnya.

Ketika pada hari pemilihan sang penerima masuk ke bilik suara, bukan lagi pertimbangan tentang program, kapasitas, atau integritas kandidat yang mendominasi pikirannya, melainkan bayangan tentang siapa yang telah "berbaik hati" kepadanya (Liadi & Erawati, 2020). Dalam kerangka Freire, ini adalah momen di mana kaum tertindas secara sukarela mengambil alih fungsi penindas ke dalam dirinya sendiri, sebuah kondisi yang disebut sebagai *internalization of the oppressor* (Harisuddin, 1981). Orang yang dulunya menjadi korban penindasan justru berbalik melanggengkan penindasan itu sendiri, bukan karena paksaan dari luar, melainkan karena logika internal yang telah terbentuk dari bertahun-tahun berinteraksi dengan sistem yang tidak pernah memberinya ruang untuk berpikir kritis. Hal ini sejalan dengan kritik Freire terhadap *banking concept of education*, ketika seseorang terbiasa menjadi penerima pasif tanpa daya kritis, ia tidak hanya kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan pengetahuan yang diberikan kepadanya, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan "kebaikan" yang diberikan kepadanya (Eka dkk., 2026). Dalam logika ini, menerima uang politik tanpa bertanya adalah konsekuensi langsung dari mentalitas yang dibentuk oleh sistem yang tidak pernah mendidiknya untuk bertanya.

Yang membuat kondisi ini semakin kompleks adalah fakta bahwa perasaan hutang budi tersebut diperkuat secara sosial melalui mekanisme pengawasan

komunitas. Di desa-desa dengan ikatan sosial yang kuat, keputusan memilih nyaris tidak pernah sepenuhnya bersifat privat. (Aspinall dkk., 2017) menemukan bahwa broker akar rumput yang tertanam dalam komunitas lokal mampu menarik kesimpulan tentang bagaimana pemilih memberikan suara dan berpotensi menghukum mereka yang tidak memenuhi kesepakatan, sehingga pengawasan komunitas ini menjadi mekanisme tambahan yang memperkuat tekanan psikologis hutang budi. Pola patron-klien yang sudah terlanjur mengakar inilah yang menurut Yasin & Kadji (2025) menjadikan praktik penerimaan uang politik tidak lagi dirasakan sebagai pelanggaran, melainkan sebagai pemenuhan kewajiban sosial yang wajar. Ramadhan dkk. (2024) menambahkan bahwa kultur politik yang korup semacam ini sudah begitu mengakar di masyarakat sehingga sulit untuk diubah hanya melalui pendekatan penegakan hukum semata, karena akarnya bukan pada pelanggaran sadar melainkan pada normalisasi yang terbentuk secara kultural dan psikologis selama bertahun-tahun.

Konsekuensi jangka panjang dari dinamika ini sangat serius bagi proses pembebasan politik. Bethari (2024) menjelaskan bahwa *conscientizacao* atau penyadaran kritis yang menjadi syarat bagi pembebasan sejati hanya dapat terjadi ketika seseorang mampu bergerak dari kesadaran semi-intransitif menuju kesadaran transitif-kritis, yakni ketika ia mulai melihat realitas bukan sebagai takdir melainkan sebagai problem yang menuntut untuk dipecahkan. Namun perasaan hutang budi secara sistematis menutup jalan menuju pergeseran kesadaran itu. Seseorang yang merasa berutang secara moral tidak berada dalam posisi psikologis yang kondusif untuk berpikir kritis, karena setiap dorongan untuk mempertanyakan akan segera diredam oleh rasa tidak enak atau rasa bersalah karena telah menerima namun tidak membalas. Dengan demikian, hutang budi bukan sekadar perasaan, ia adalah mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk memastikan bahwa kesadaran magis tetap lestari dari satu siklus pemilihan ke siklus berikutnya, dan proses humanisasi kolektif pun terus tertunda.

Pada akhirnya, pembebasan dari jerat ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui penegakan hukum atau kampanye antikorupsi yang bersifat *top-down*. Freire menegaskan bahwa pembebasan sejati harus datang dari dalam diri kaum tertindas

itu sendiri, melalui pendidikan yang membebaskan (*liberating education*) yang berbasis dialog, bukan indoktrinasi, serta melalui pengembangan *critical consciousness* yang memungkinkan warga negara untuk mengidentifikasi akar penindasan dan bertindak secara kolektif mengubahnya (Eka dkk., 2026). Ramadhan dkk., (2024) merekomendasikan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya politik uang harus menjadi prioritas, karena masyarakat perlu menyadari bahwa praktik ini bukan hanya merusak demokrasi, tetapi secara langsung merugikan mereka sendiri dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, pendidikan Islam sesungguhnya memiliki potensi besar sebagai jembatan menuju kesadaran kritis tersebut, karena sedekah dalam Islam pada hakikatnya bukan hanya tentang memberi harta, melainkan mencakup seluruh perbuatan baik termasuk amar ma'ruf nahi munkar; menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (Paslah & Amiruddin, 2021). Menerima uang suap dalam balutan kata "sedekah" dan kemudian memilih berdasarkan tekanan hutang budi adalah bertentangan secara diametral dengan esensi tersebut. Dengan demikian, rekonstruksi pemahaman keagamaan yang otentik, bukan yang manipulatif, adalah salah satu kunci utama untuk memutus rantai kesadaran magis yang selama ini membelenggu kedaulatan politik kaum tertindas dan menghambat tercapainya humanisasi kolektif yang dicita-citakan Freire.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik politik uang (*money politics*) yang membudaya di Indonesia, khususnya di kalangan kelas bawah, bukan sekadar persoalan transaksi material, melainkan hasil dari manipulasi simbolik yang sistematis. Rekonstruksi makna terhadap istilah keagamaan seperti "berkah" dan "sedekah" terbukti efektif digunakan oleh aktor politik sebagai instrumen normalisasi untuk menjinakkan daya kritis masyarakat. Di tengah himpitan kemiskinan struktural, narasi religius ini berhasil mengubah persepsi suap politik (*vote buying*) dari sebuah pelanggaran etika menjadi bentuk bantuan materi yang dianggap wajar, sah, dan bahkan suci. Realitas ekonomi yang terdesak inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi langgengnya "kesadaran magis", di mana

masyarakat menerima penindasan ekonomi sebagai sebuah keniscayaan atau takdir, dan melihat pemberian materi sebagai solusi instan bagi kelangsungan hidup sehari-hari.

Implikasi dari normalisasi ini menciptakan belenggu psikologis yang sangat kuat dalam bentuk perasaan hutang budi. Perasaan ini, yang diperkuat oleh nilai resiprositas dalam budaya lokal sebagai "perancah kultural", memaksa kaum tertindas untuk melakukan internalisasi terhadap logika penindas (*internalization of the oppressor*). Akibatnya, kebebasan politik penerima terkooptasi oleh kewajiban moral yang manipulatif, yang secara otomatis menutup jalan menuju tercapainya *conscientização* (kesadaran kritis). Selama praktik politik uang masih dibingkai dalam selubung kesucian religius dan diterima melalui kacamata kesadaran magis, maka proses pembebasan politik sejati akan terus terhambat. Oleh karena itu, memutus rantai politik uang menuntut adanya pendidikan yang membebaskan (*liberating education*) serta rekonstruksi pemahaman keagamaan yang autentik guna mengembalikan kedaulatan politik ke tangan rakyat sebagai subjek sejarah yang sadar dan kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. N., Erawati, D., & Dakhoir, A. (2023). Indonesian Democratic and Political Climate in the Perspective of Marxism and Islamic Economics. *Proceedings of International Conference on Interdisciplinary Research*, 3(1). Diambil dari <https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/6173>
- Akbar, Z. A., Hakim, M. N., Saefa, F., & Harahap, A. (t.t.). *Bunga Rampai Dialektika Hukum Dan Realitas Sosial*:
- Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., Rubaidi, & Triantini, Z. E. (2017). Vote Buying In Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic And Effectiveness. *Journal of East Asian Studies*, 17(1), 1–27. <https://doi.org/10.1017/jea.2016.31>
- Bethari, R. A. (2024a). Eksistensi Dan Kebebasan Dalam Pemikiran Paulo Freire: Menuju Humanisasi Melalui Kesadaran Kritis. *Jurnal Filsafat*, 30.
- Bethari, R. A. (2024b). Eksistensi Dan Kebebasan Dalam Pemikiran Paulo Freire: Menuju Humanisasi Melalui Kesadaran Kritis. *Jurnal Filsafat*, 30.

- Butar, M. D. B. (2008). Konsep Penyadaran Paulo Freire Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Masyarakat. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- developer, medcom id. (2024, Februari 22). Miris, Survei Catat Jumlah Pemilih karena Politik Uang Meningkat di Pemilu 2024. Diambil 30 April 2026, dari Medcom.id website: <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/GNIP1OVN-miris-survei-catat-jumlah-pemilih-karena-politik-uang-meningkat-di-pemilu-2024>
- Edma, S. P., Darmawan, K., Rumanasen, R. A., Alfitrah, F., & Sinaga, J. B. B. (2025). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH)*, 7(1). Diambil dari <https://journalversa.com/s/index.php/jhtih/article/view/1220>
- Eka, E. J., Syamsul Rijal, Firdaus M Yunus, & Suraiya It. (2026). Pedagogi Kritis Paulo Freire Dan Transformasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 7(1), 85–97. <https://doi.org/10.29103/jspm.v7i1.22649>
- Harisuddin, A. (1981). Teori-Teori Pendidikan Pembebasan Paulo Freire. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Hasanah, N. (2018). Makna Lafal Barokah dalam Tafsir Al-Azhar. *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 1(2), 57. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v1i2.81>
- KPU Papua Pegunungan. (2025, Oktober 19). Politik Uang dalam Pemilu: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Upaya Pencegahannya. Diambil 15 April 2026, dari https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1068_politik-uang-dalam-pemilu-pengertian-penyebab-dampak-dan-upaya-pencegahannya
- Kristiani, M. R. P., Hadiwijoyo, S. S., & Sihainenia, R. R. (2025). Keberadaan TPA Sebagai Peluang Ekonomi Masyarakat Ngronggo: Analisis Habitus dari Perspektif Pierre Bourdieu. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3659–3670. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1690>
- Liadi, H. F., & Erawati, D. (2020). Politik Identitas Pada Pilkada Kalimantan Tengah: Tatapan Mata Warga Bakumpai terhadap Pilkada Kalimantan Tengah. Airlangga University Press.
- Paslah, R., & Amiruddin, N. (2021). Konsep Sedekah Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Analisis Isi Buku *The Power Of Sedekah*).
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2024, Desember 6). “Sedekah” di Masa Pemilihan: Bagaimana Kita Menyikapinya? - ACLC KPK. Diambil 15 April 2026, dari Pusat Edukasi Antikorupsi website: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20241206-sedekah--di-masa-pemilihan--bagaimana-kita-menyikapinya>

Ramadhan, S., Rahmawati, N., Sari, Y. I., & Ananto, M. A. M. (2024). Fenomena Politik Uang pada Pemilihan Umum Di Indonesia Solusi dan Tantangannya.

Tulus, R. (2025, September 10). Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Teori Konflik Dan Teori Motivasi. Diambil 15 April 2026, dari <https://ptun-manado.go.id/2025/09/10/fenomena-politik-uang-dalam-pemilihan-kepala-desa-dalam-perspektif-teori-konflik-dan-teori-motivasi/>

Wakhidah, Z. N. (2025). Konsep Sedekah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Semantik Toshihiko Izutsu). Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Yasin, H., & Kadji, J. (2025). Politik Uang dalam Pilkada 2024 Kabupaten Jayapura: Antara Legitimasi Sosial dan Perilaku Memilih. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(2), 249–261. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10894>

Yunita, Y. (2022). Konsep Sedekah Dalam Islam. 1(01).